

## Daftar Pustaka

### BUKU:

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.

\_\_\_\_\_. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nurbangsih, Enny, *Problematika Peraturan Daerah aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rosidin, U. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Sukardi. *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2016.

\_\_\_\_\_. *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### JURNAL:

Ago, M. S., Renggong, R., & Almusawir, A, "Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 81-88, 2021.

Ananditya, W. S., Indarja, I., & Wisnaeni, F, "*Tinjauan Yuridis Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.*" *Diponegoro Law Journal*, 11(3), 2022.

- Armin, U., Kosariza, K., & Ansorullah, A, “Analisis pengawasan peraturan daerah berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 261-279, 2023.
- Dadan Ramdani, “Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi”. *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 31-66, 2022.
- Fikriana, A., & Yusuf, J. A, “Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah”, *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 44-52, 2024.
- Hermana, M. A., & Elcaputera, A, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 113-129, 2020.
- Kumendong, A. Y, “Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”, *LEX PRIVATUM*, 11(5), 2023.
- Marjani, A. F. L. Hadi, S, “Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Daerah di Jawa Timur,” *Jurnal Constitution*, 155-176, 2024.
- Nandi, N, “Sinergi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Efektif: The Synergy Of Central And Regional Government Authorities Is Crucial In Achieving Effective Regional Autonomy”, *Case Law: Journal of Law*, 5(2), 2024.
- Nirmala, Nyoman Yosi Andhika, “Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara”, *LEX ADMINISTRATUM 9.1*, 2021.
- Nuriani, E. “Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”, *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 184-201, 2019.
- Prihatiningtyas, W, “Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”, *Airlangga Development Journal*, 1(1), 43-71, 2017.
- Rauf, Abdul, Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum* vol. 9 no. 4, 2015.

- Rauf, R, “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”, *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1), 1-9, 2018.
- Sugiarto, Anton Hutomo, “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2: 150-172, 2019.
- Sori, B. L., Hananto, U. D., & Wisnaeni, F, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17, 2016.
- Trinanda, D, “Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018” *IJTIHAD*, 38(1), 15-26, 2022.
- Zarkasi, A, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 43188, 2010.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Di Jawa Tengah

**Skripsi:**

Ach. Fickry Lengga Marjani, “Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Jawa Timur,” Universitas Islam Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Andi Muh. Dwihar Setia Putra, “Pembinaan Dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Sulawesi Selatan,” Universitas Hasanuddin, 2020.

Vikkania Rahmi Andika Putri, “Analisis Yuridis Kewenangan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Universitas Andalas, 2021.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Ellia Anggraini, S.H. selaku Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 Januari 2026.

Wawancara dengan Amaliya Rahman, S.H. M.KN. selaku kepala sub bagian Rancangan Peraturan Daerah Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 Januari 2025.

**Sumber Lain:**

Buku II LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, diakses melalui laman [https://humas.jatengprov.go.id/dokumen\\_ppid/1587022569176-Bab%20I%2018.pdf](https://humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1587022569176-Bab%20I%2018.pdf), pada tanggal 18 Januari 2026.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “PP No. 33/2018: Inilah Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat”, <https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/>, diakses pada 23 November 2025.

Sukardi, “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung,” <https://unair.ac.id/kewenangan-pembatalan-peraturan-daerah-oleh-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2026.

Sulaiman, “Problematika Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota”  
<https://jdih.babelprov.go.id/problematika-evaluasi-raperda-kabupatenkota>,  
diakses pada tanggal 26 Januari 2026.

Triyadi Rizki Budiman, “Pentingnya Proses Fasilitasi Dan Evaluasi Dalam  
Penyusunan Raperda”  
<https://birohukumham.jabarprov.go.id/postingan/pentingnya-proses-fasilitasi-dan-evaluasi-dalam-penyusunan-raperda-690b018fabe0a12dd9a52c84>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025.